

Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0

Rira Nuradhawati, Dadang Sufianto, Wawan Gunawan, Yovinus, Danny Permana

Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unjani

Penulis korespondensi : rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Abstrak: *Guna membangun kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan Desa Membangun, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesempatan, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan dari berbagai prioritas kegiatan, tidak berdasarkan trial and error atau coba-coba, melainkan diakibatkan adanya perencanaan yang baik. Adanya isu revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan. Adapun maksud dan tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembekalan ini maka SDM manusia yang ada di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mampu meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada era 4.0. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah melalui pembekalan materi, pelatihan, pendampingan, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat dalam perspektif era 4.0 untuk menghindarkan diri dari ketertinggalan dengan semakin cepatnya informasi dan teknologi yang berkembang saat ini yang tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai lapisan masyarakat bukan hanya sosok pemimpin saja.*

Kata kunci: *peningkatan kapasitas, SDM, pemerintah desa, era 4.0*

Abstract: *In order to build village independence in the framework of realizing a Building Village, it must be started from a good village planning process, followed by good program governance as well. Effective rural development is not solely due to opportunities, but is the result of determining options from various priority activities, not based on trial and error, but the result of good planning. The issue of the industrial revolution 4.0 needs serious attention from the village government so that it can prepare itself to answer these challenges. Competent resources are one of the main factors determining the success of the transformation of the 4.0 era, therefore increasing the capacity of human resources (HR) needs to be prioritized. The aims and objectives of this community service are to provide counseling and debriefing, so human resources in Nanjung Village, Margaasih District, Bandung Regency are able to increase their capacity or ability in implementing development, especially in the 4.0 era. The*

method or approach used in the HR Capacity Building Activities in Nanjung Village, Margaasih District, Bandung Regency is through material debriefing, training, mentoring, Focus Group Discussions (FGD) and seminars. This community service activity makes a positive contribution to efforts to increase knowledge, understanding, awareness and mastery of efforts to increase the capacity of human resources for village and community officials in the perspective of the 4.0 era to avoid being left behind with the increasingly fast developing information and technology today, of course demands the readiness of various levels of society, not just a leader.

Keywords: *capacity building, human resources, village government, era 4.0*

1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar dan harapan sekaligus juga tantangan dan peluang baru bagi desa terlebih di era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Keberadaan Desa sendiri secara yuridis diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari ketentuan tersebut, Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut yang dengan visi yang mampu mengarahkan desa menjadi sebuah entitas mandiri dengan adanya konsep *self governing community* dan *local self government*. Adapun visi tersebut merupakan suatu cita-cita yang luhur karena adanya pendekatan yang bersifat “membangun desa” berubah menjadi “desa membangun”. Dari perubahan pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa desa yang sering dipersepsikan sebagai suatu entitas yang lemah, sehingga memerlukan pemerintahan yang di atasnya untuk membangun desa, dibalik menjadi desa membangun Negara terlebih posisi desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan dan keberhasilan suatu Negara.

Adanya penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, maka menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakatnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan juga unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi suatu syarat supaya pelaksanaan UU Desa itu sendiri dapat berjalan secara optimal.

Guna membangun kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan Desa Membangun, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesempatan, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan dari berbagai prioritas kegiatan, tidak berdasarkan *trial and error* atau coba-coba, melainkan diakibatkan adanya perencanaan yang baik.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya isu revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan.

Istilah kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran "kemampuan" dari seseorang dan "kemampuan" itu sendiri mempunyai banyak makna, Kartono (1993:13) bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa". Lebih lanjut, Syarif (1991:8) menyebutkan beberapa

jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa khususnya dalam perspektif era 4.0 senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993:36) mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan". Sementara itu, menurut Steers dalam Rasyid (1992) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman".

Morison dalam Damayanti (2014) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Merilee S.Grindle dalam Damayanti (2014) sebagai pakar *capacity building* yang lebih khusus mengkaji dalam bidang pemerintahan memfokuskan *capacity building* pada tiga dimensi, yaitu: 1. *Development of the human resource* 2. *Strengthening organization*; and 3. *Reformation of institutions*

Kemudian Morgan dalam Soeprapto (2010:10) menyatakan bahwa,

“kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya Morgan dalam Soeprapto (2010:10) kembali menyatakan bahwa kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Pemahaman Memahami melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
2. Keterampilan Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
3. Kemampuan Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Setiap individu dipastikan membutuhkan suatu kapasitas atau kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan secara individual maupun dalam organisasi dimana individu itu berada. Guna menghindari terjadinya kesenjangan dalam kemampuan atau kapasitas antar individu, maka setiap individu diharapkan selalu memiliki daya dan upaya guna meningkatkan kapasitas atau kemampuannya. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang individu guna menghindari terjadinya kesenjangan tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh

Sedarmayanti (2010:163) mengatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap. Lebih lanjut Yuniarsih dan suwatno (2009:40) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi karyawan, program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa. Seperti yang dikatakan Siagian (2009:191) suatu program pendidikan dan pelatihan hanya dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relatif permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa

warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance* sehingga desa tidak akan mengalami ketertinggalan dalam pembangunan khususnya di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Pengertian Pemerintah Desa menurut Saparin (1979:21) adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman tentang Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat maka posisi desa memiliki otonomi yang asli.

Selanjutnya Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari Pemerintah Pusat. Pemahaman ini diambil berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah Desa mengetahui kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, untuk itu desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumberdaya desanya secara mandiri. Dengan adanya kemandirian desa maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penyuluhan masyarakat diberikan kepada perangkat desa dan juga perwakilan dari unsur-unsur masyarakat di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, penyuluhan dilakukan agar perangkat desa dan juga masyarakat mampu meningkatkan kemampuannya terutama dalam pelaksanaan pembangunan di desanya dalam perspektif era revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri Gelombang ke-4 (*Industrial Revolution 4.0*). Era 2000'an hingga saat ini merupakan era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*), yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (**fusion**) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Dengan bahasa yang lebih sederhana bisa dikatakan bahwa pembauran

teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumberdaya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

2. Metode

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah melalui pembekalan materi, pelatihan, pendampingan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan seminar.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada perangkat desa dan masyarakat berupa :

1. Perangkat desa dan masyarakat memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuannya .
2. Pemerintah desa dapat memfasilitasi perangkat desa dan juga masyarakat desa dalam meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Perangkat desa dan masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi setiap kegiatan pembangunan sehingga tidak akan mengalami ketertinggalan terlebih di era 4.0.

Luaran yang dapat dijadikan indikator dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

1. Pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa memiliki kemampuan atau kapasitas lebih baik dari sebelumnya.
2. Perangkat desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.
3. Masyarakat memiliki keinginan yang tinggi untuk selalu terlibat dalam setiap kegiatan di desanya.

Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu bentuk dharma dalam tri dharma perguruan tinggi yang diharapkan akan memberikan kontribusi nyata dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan membantu

pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat sehingga lebih berdaya dalam upaya membangun desa mandiri atau konsep desa membangun.

3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul: “Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0.” yang diselenggarakan oleh perwakilan Dosen Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dari bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020. Bentuk pengabdian ini melalui tahapan sosialisasi mengenai pentingnya peningkatan kapasitas SDM pada perspektif era 4.0 baik dari sisi upaya yang perlu dilakukan ataupun kemungkinan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang sangat dibutuhkan untuk bisa menjawab segala tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Tahapan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan identifikasi perangkat desa di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pelatihan yang dilakukan adalah mengenai cara bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dari perangkat desa baik itu melalui pelatihan membuat visi dan misi yang baik dalam rangka pembangunan yang lebih terarah ataupun pelatihan berkaitan dengan peningkatan kapasitas dari perangkat desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Nanjung.

Peserta pelatihan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya beserta perwakilan anggota BPD Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Sebelum pelaksanaan pelatihan, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya peningkatan kapasitas SDM di Desa Nanjung khususnya dalam perspektif era 4.0. Selain sosialisasi, juga dilaksanakan serangkaian diskusi yang membahas untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan penguasaan para peserta terhadap pentingnya peningkatan kapasitas SDM itu sendiri. Terlebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan kemampuan dari perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang menjadi masalah bersama Desa Nanjung yakni menyiasati berubahnya Desa Nanjung dari desa agraris menjadi desa industri yang tentunya memberikan banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah desa dalam menghadapi segala akibat dari berubahnya Desa Nanjung agar tidak menjadi sejarah. Maka dibutuhkan perangkat desa yang

memiliki kemampuan atau kapasitas yang mumpuni untuk tanggap dalam segala perubahan terutama perubahan dari kondisi agraris ke industri ditambah dengan semakin gencarnya arus globalisasi yang memang membutuhkan kesiapan perangkat desa untuk menghadapinya.

Beberapa diskusi kemudian dilaksanakan untuk membandingkan hasil diskusi sebelumnya, dimana materi dalam diskusi tersebut berkaitan dengan:

1. Pemahaman terhadap identifikasi bagaimana upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa khususnya dan masyarakat umumnya di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam perspektif era 4.0.
2. Pemahaman mengenai kesadaran tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi persaingan di perspektif era 4.0
3. Pemahaman mengenai peningkatan kapasitas SDM dalam pembuatan visi dan misi yang baik yang disesuaikan dengan kondisi di Desa Nanjung.
4. Pemahaman mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di Desa Nanjung.
5. Pelatihan pembuatan visi dan misi yang baik dan tepat dengan kondisi masyarakat Desa Nanjung.

Selanjutnya secara umum materi yang disampaikan berkaitan dengan substansi dalam diskusi tersebut, yaitu menyampaikan persoalan mengenai peningkatan kapasitas SDM khususnya perangkat desa dan pada umumnya masyarakat di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan juga membahas materi bagaimana meningkatkan kemampuan perangkat desa guna membuat visi dan misi yang baik yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat yang ada di Desa Nanjung.

Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan keinginan perangkat desa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam perspektif era 4.0 cukup tinggi dengan antusiasnya mereka peserta mengikuti kegiatan pelatihan. Selanjutnya, untuk kedepannya upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa saja tapi juga menjadi tanggung jawab dan tugas semuanya untuk selalu meningkatkan kapasitasnya terlebih dalam perspektif era 4.0.

Apabila dilihat dari kenyataan di lapangan yang ada di Desa Nanjung, masih rendahnya kapasitas dari perangkat desa dan masyarakat di Desa Nanjung disebabkan karena

ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sosok pemimpin yakni Kepala Desa dan tidak ada keberlanjutannya dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Hal ini yang memperkuat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani untuk melaksanakan kegiatan di Desa Nanjung dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat khususnya dalam perspektif era 4.0.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan penguasaan masyarakat/perangkat desa dalam kemampuan khususnya di era globalisasi dengan adanya jargon 4.0, yang tentu saja menuntut kemampuan dari perangkat desa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, dan buat masyarakat supaya lebih diberdayakan dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Nanjung.
2. Kurang sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat/peserta dalam upaya peningkatan kapasitas mereka khususnya dalam kegiatan pelatihan sehingga nampak yang mengikuti kegiatan pelatihan orangnya masih yang sama dan juga kurangnya transfer ilmu dari masyarakat atau perangkat desa yang mengikuti kegiatan pelatihan pada masyarakat lainnya.
3. Kurangnya pemahaman perangkat desa bagaimana membuat visi dan misi yang baik dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian visi misi itu sendiri.
4. Ketergantungan yang tinggi pada sosok pemimpin yakni Kepala Desa sehingga Nampak kurangnya inisiasi dari perangkat desa ataupun masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerapan kemampuan mereka dalam pelaksanaan tugas ataupun kegiatan sehari-hari khususnya dalam kegiatan pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Tindakan evaluasi yang dilaksanakan meliputi upaya untuk memberikan sejumlah pertanyaan kepada peserta terkait dengan pengetahuan dan pemahaman guna mengukur sejauh mana penguasaan terhadap materi yang diberikan dalam kegiatan sebelumnya. Secara umum, kegiatan pelatihan telah memberikan pemahaman kepada peserta di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan menambah pengetahuan dan pemahaman mereka

berkaitan dengan bagaimana upaya guna meningkatkan kapasitas mereka khususnya perangkat desa guna memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya.

Kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai pentingnya peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam era globalisasi dengan adanya perspektif 4.0 yang tentu saja memerlukan kesiapan dari seluruh perangkat dan juga masyarakat Desa Nanjung agar tidak mengalami ketertinggalan dan kelak menjadi sejarah ditelan derasnya perkembangan jaman. Dengan demikian, pengetahuan, penguasaan dan pemahaman serta kesadaran terhadap pentingnya peningkatan kapasitas SDM akan mempengaruhi cara berpikir perangkat desa dan juga masyarakat pada umumnya untuk selalu berbenah diri dengan selalu belajar dan ikut aktif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sebagai upaya memperoleh informasi dan ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Bandung dalam hal kualitas SDM perangkat desa dan masyarakatnya, sehingga kelak diharapkan akan muncul menjadi desa yang berprestasi bukan malah menjadi sejarah dengan segala permasalahannya.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat dalam perspektif era 4.0 untuk menghindari diri dari ketertinggalan dengan semakin cepatnya informasi dan teknologi yang berkembang saat ini yang tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai lapisan masyarakat bukan hanya sosok pemimpin saja. Selanjutnya dengan penguasaan dan juga pemahaman pentingnya peningkatan kapasitas SDM di perspektif era 4.0, maka perangkat desa dan juga masyarakat dapat segera mengantisipasi ketertinggalannya dengan selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi perangkat desa dan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan dalam setiap kegiatan pembangunan di derasnya arus globalisasi saat ini. Dengan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitasnya, maka secara langsung dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nanjung sehingga bisa lebih siap dan tampil di depan menjadi role model bagi keberhasilan desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi dan pelatihan yang kemudian dievaluasi

dengan melakukan pendampingan, pada khususnya kepada perangkat desa Nanjung untuk terus selalu melakukan kegiatan yang dapat membantu upaya peningkatan kapasitas mereka sebagai pelayan masyarakat di desa sehingga tidak hanya tergantung dari arahan seorang Kepala Desa tapi lebih memiliki inisiatif untuk melakukan suatu tindakan guna kemajuan masyarakat dan keberhasilan pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Kegiatan pendampingan dan juga pelatihan belum bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari adanya perubahan sikap dan tindakan juga pemikiran perangkat desa ataupun masyarakat dalam kesiapannya menghadapi persaingan khususnya di era 4.0 saat ini. Dengan demikian sangat diharapkan bahwa perangkat desa dan juga masyarakat lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk selalu meningkatkan kapasitasnya baik itu melalui kursus, pelatihan, mengikuti seminar-seminar ataupun dengan cara belajar mandiri dengan lebih banyak membaca ataupun mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi kegiatan pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Di lapangan masih nampak bagaimana perangkat desa dan juga masyarakat kurang memiliki inisiatif sendiri untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sosok seorang kepala desa. Oleh karena itu diperlukan juga motivasi yang tinggi dari sosok seorang kepala desa untuk membakar semangat perangkat desa dan juga masyarakat untuk senantiasa belajar dan berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya. Sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM ini merupakan suatu langkah guna membentuk perangkat desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk selalu sadar dan memiliki kemauan guna belajar dan mempelajari bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitasnya khususnya para era 4.0 yang tentu saja bukan hal yang mudah karena diperlukan persiapan di berbagai lini kehidupan terutama dalam hal kapasitas atau kemampuannya untuk selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya.

Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuannya dapat mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dapat menjadi pijakan guna menentukan langkah selanjutnya yang harus ditempuh dengan lebih memperbanyak kegiatan pelatihan atau pendampingan dalam peningkatan kapasitas SDM di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Dengan adanya keberlanjutan dalam kegiatan pengabdian

ataupun pelatihan mengenai bagaimana membuat visi misi yang baik, pengelolaan data dengan berbasis teknologi informasi dan adanya transfer teknologi ketika ada kegiatan pelatihan. Untuk kegiatan pelatihan pun pesertanya tidak orang yang sama, supaya ada pemerataan dalam pelatihan dan kelak adanya transfer ilmu di kalangan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala Desa Nanjung, Dian Irawan, SE, Sekretaris Desa Nanjung, Uden Maman Suteja, perangkat Desa Nanjung dan masyarakat Desa Nanjung yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Referensi

- Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. 2014. Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di 142 Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (3), 464-470.
- Kartono, K. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. *Rajawali Press*: Jakarta, 13.
- Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah, Universitas Tadulako Palu.
- Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. *Refika Aditama*, Bandung, 163.
- Siagian, P. Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 191
- Soeprapto, R. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance. *World Bank*, 10.
- Syarif, R. 1991. Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan. *Bina Aksara*, Bandung, 8.
- Tjiptoherianto, P. 1993. Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Prisma*. Jakarta, 36.
- Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh), *Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 165.
- Yuniarsih, T. & Suwatno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. *Alfabeta*, Bandung, 40.

